

ANALISIS FUNGSI KEPEMIMPINAN KEPALA DESA PUTERI SEMBILAN KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS

Abdul Rais, Fara Shaliza

¹²³ Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning, Dumai, Indonesia 506030

ARTICLE HISTORY

Received :

Revised :

Accepted :

KEYWORDS

Pelayanan Publik

Kepemimpinan

Fungsi Kepemimpinan

ABSTRACT

Pemerintah Desa dilihat dari sistem pemerintahan Indonesia merupakan ujung tombak dari pemerintahan daerah yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas. Namun dari hasil pengamatan penulis terlihat bahwa fungsi kepemimpinan Kepala Desa Puteri Sembilan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan cenderung belum begitu baik, karena kurangnya fungsi Kepala Desa dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi masih terbilang sangat rendah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menurut pendapat Pasolong (2013:30-31) ada empat indikator yaitu : Fungsi Perintah, Fungsi Konsultatif, Fungsi Partisipatif, Fungsi Delegasi. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Aparatur Desa dan masyarakat dengan jumlah sampel 68 orang. Teknik pengambilan sampel untuk perangkat desa menggunakan *Sensus Sampling* atau *Sampling Jenuh* sedangkan untuk masyarakat Desa menggunakan Teknik *Purposive*. Hasil Penelitian tentang Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis dikategorikan Baik dengan total skor 1746 (71.32%). Dalam penelitian ini yang menjadi Faktor Pendukung Adanya Fungsi Perintah dari Kepala Desa Puteri Sembilan dan Adanya Fungsi Partisipatif dari Kepala Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis sedangkan yang menjadi faktor Penghambat Masih lemahnya Fungsi Konsultatif dari Kepala Desa Puteri Sembilan dan Masih lemahnya Fungsi Delegasi Kepala Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis.

1. Pendahuluan

Pemerintah Desa dilihat dari sistem pemerintahan Indonesia merupakan ujung tombak dari pemerintahan daerah yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas. Pemerintah sebagai instansi pelayanan masyarakat dituntut untuk memperbaiki dan senantiasa melakukan reformasi serta mengantisipasi perkembangan masyarakat yang terjadi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan citra pemerintah desa menuju kearah yang lebih baik.

Pemimpin memiliki fungsi dalam pemerintahan untuk menggerakkan manusia untuk bekerja sama dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang bertujuan untuk memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberikan motivasi kerja dalam membawa para pengikut kepada sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan kebutuhan waktu dan pencapaian.

Kecamatan Rupa Utara merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Rupa Utara terdiri dari beberapa desa. Salah satunya adalah Desa Puteri Sembilan. Desa Puteri Sembilan merupakan desayang berada pada posisi jalur utama menuju kepusat kota Kecamatan Rupa Utara. Wilayah Desa Puteri Sembilan mempunyai luas 62 km². Pada tahun 2019, jumlah Penduduk Desa Puteri Sembilan adalah 1.568 jiwa atau 418 (KK).

Sumber penghasilan masyarakat Desa Puteri Sembilan antara lain Pertanian, Perkebunan Karet dan Sawit, Anyaman Atap, Batu bata/batako, Pengrajin, PNS, Honorer, POLRI, Karyawan Swasta, Nelayan, Peternakan (Ayam, Sapi, Babi, Itik dan Kambing), Buruh dan sebagian kecil pengusaha kecil dan pedagang harian. Desa dituntut untuk bisa menjalankan roda pemerintahan di desa dikarenakan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dikeluarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pemerintahan Desa. sebagai tindak lanjut dari ketentuan dari Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Menyebutkan bahwa Desa atau Desa Adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam mengatur roda Pemerintahan Desa maka diperlukan sosok seorang pemimpin yaitu kepala desa. Dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 31 dan 34, ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur tentang pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota.

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Bengkalis.

Kepala Desa memiliki fungsi penting dalam menjalankan roda pemerintahan Desa. Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan harus mampu merencanakan dan membuat suatu keputusan yang nanti dipergunakan dalam melaksanakan roda pemerintahan Desa, sehingga pemerintahan Desa dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam membuat keputusan Kepala Desa juga harus mempertimbangkan pendapat-pendapat dari aparatur dan masyarakatnya, agar keputusan yang dibuat Kepala Desa dapat diterima bersama.

Fungsi kepemimpinan yakni seorang yang mampu mendorong dan mempengaruhi orang atau sekelompok orang lain, Sehingga terciptanya hubungan kerja yang serasi dan menguntungkan untuk melakukan berbagai aktivitas tertentu dalam mencapai tujuan yang diinginkan, serta memiliki kemampuan menganalisa dan menarik kesimpulan yang tepat. Pemimpin harus mampu menganalisa sesuatu masalah, situasi atau serangkaian keadaan tertentu dan menarik kesimpulan-kesimpulan yang tepat.

Dalam hal ini Kepala Desa harus mampu berkoordinasi dengan cara mengadakan rapat musyawarah, sehingga mempermudah kepala desa dalam membuat keputusan. Sesuai dengan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang musyawarah desa. Namun pada kenyataannya di Desa Puteri Sembilan tingkat kehadiran dalam rapat musyawarah desa dikategorikan rendah dari yang diharapkan karena masih banyak dari lembaga-lembaga desa dan masyarakat desa yang tidak menghadiri musyawarah yang diadakan.

Dapat dilihat dari daftar hadir acara kegiatan musyawarah desa, seperti pada tahun 2018 untuk musyawarah MTQ tingkat desa dari yang diundang BPD, LKMD, Kepala Dusun, RW, RT dan Tokoh Agama untuk kehadiran yang paling rendah yaitu dari tokoh agama dari 10 orang yang diundang yang hadir hanya 5 orang, LKMD yang hadir hanya 3 orang dari 10 orang yang diundang, BPD yang hadir 5 orang dari

9 orang yang diundang dan untuk yang lainnya sama saja tidak memenuhi undangan yang disebarkan.

Selanjutnya pelatihan tentang penyuluhan hukum dan penyelenggaraan pemerintah desa yang diundang BPD, Kepala KPN, Kepala Dusun, Kaur, Bendahara Desa, RW, RT, untuk kehadiran yang paling rendah yaitu BPD yang sebagai ujung tombak pembangunan dari yang diundang 9 orang hanya 4 orang yang hadir, untuk Kaur dari 4 orang yang diundang hanya 2 orang yang hadir, sedangkan untuk yang lainnya masih ada yang tidak menghadiri undangan yang telah disebarkan.

Selanjutnya untuk tahun 2019 ada sosialisasi tentang pentingnya menjaga hutan, diundang ada BPD, Damkar, RW, RT, dan Masyarakat. Untuk kehadiran yang paling rendah yaitu BPD yang hanya 2 orang dari 9 orang yang diundang, untuk RT yang hadir hanya 3 orang dari 11 orang sedangkan untuk yang lainnya sama saja tidak semua memenuhi undangan yang telah disebarkan. Musyawarah selanjutnya yaitu Sosialisasi APBDes yang diundang ada BPD, Kepala Dusun, RW, RT, dan Tokoh Masyarakat. Untuk kehadiran yang paling rendah adalah BPD yang hadir hanya 3 orang dari 9 orang yang diundang, Tokoh Masyarakat yang hadir hanya 5 orang dari 10 orang yang diundang dan untuk lembaga lainnya sama juga tidak semua memenuhi undangan yang telah disebarkan. dari musyawarah yang dilakukan di Desa Puteri Sembilan sangat menentukan keberhasilan yang ingin dicapai oleh kegiatan yang akan dilakukan di Desa Puteri Sembilan.

Kehadiran lembaga Desa dan masyarakat yang menghadiri undangan yang disebarkan, maka akan lebih baik berjalannya musyawarah tersebut karena akan ada banyak ide dan pendapat yang akan keluar dari lembaga-lembaga dan masyarakat yang diundang. Data ini menunjukkan masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menghadiri kegiatan musyawarah desa pada Desa Puteri Sembilan.

Kegiatan musyawarah desa ini sangat menunjang keaktifan masyarakat untuk mengetahui informasi ataupun mengeluarkan ide didalam musyawarah yang dilakukan di desa itu, karena dengan ikut didalam musyawarah di desa secara otomatis masyarakat akan mendapat sebuah informasi yang belum didapat sebelumnya sekaligus bisa mengeluarkan ide kreatif atau pun keluhan yang ada di kehidupan sehari-hari didalam kehidupan bersosial. Maka dapat disimpulkan dengan tidak ikut nya masyarakat dimusyawarah yang dilakukan desa apapun itu jenis musyawarahnya secara otomatis masyarakat tidak mendapatkan informasi yang ada dimusyawarah itu, apalagi untuk mengeluarkan ide ataupun pendapat.

Kondisi ini tidak terlepas dari masih kurangnya Kepala Desa melaksanakan fungsi kepemimpinan. Hal ini berpengaruh dalam pembuatan suatu keputusan, ini menunjukkan bahwa kepala desa belum mampu menjalankan fungsi Konsultatif. karena dalam membuat suatu keputusan kepala desa juga mempertimbangkan pendapat aparatur, lembaga desa dan masyarakat, sehingga keputusan yang dibuat dapat diterima dan bisa berjalan untuk itu sangat di perlukan sosok pemimpin yang baik sehingga segala aktivitas pekerjaan bisa berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang diharapkan dan mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

Selanjutnya Stogdill dalam Pasolong (2010:12) mengatakan bahwa pemimpin harus memiliki beberapa kelebihan, yaitu :

- a) Kapasitas, yaitu kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara atau verbal facility, keaslian, dan kemampuan menilai.
- b) Prestasi atau achievement, yaitu gelar keserjanaan, ilmu pengetahuan perolehan dalam olah raga dan atletik, dan lain-lain.
- c) Tanggung jawab, yaitu mandiri, berinisiatif, tekun, ulet percaya diri, agresif, dan punya hasrat untuk unggul.
- d) Partisipasi, yaitu aktif, memiliki sosiabilitas tinggi, mampu bergaul, kooperatif, atau suka bekerja sama, mudah menyesuaikan diri, punya ras humor.
- e) Status, yaitu memiliki kedudukan sosial-ekonomi yang cukup tinggi, populer, dan tenar.

Siagian (2010:47) mengatakan bahwa setidaknya ada lima fungsi-fungsi kepemimpinan

1. Pimpinan selaku penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha pencapaian tujuan.
2. Wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak-pihak diluar organisasi.
3. Pimpinan selaku komunikator yang efektif.
4. Mediator yang andal, khususnya dalam hubungan ke dalam, terutama dalam menangani situasi konflik.
5. Pimpinan selaku integrator yang efektif, rasional, objektif dan netral.

Menurut Sinambela (2006:101) pimpinan artinya seseorang yang mempunyai kemampuan dalam penyelenggaraan suatu kegiatan suatu kegiatan organisasi agar kegiatan tersebut dapat terselenggara dengan efisiensi.

Memimpin adalah kemampuan seseorang untuk mengilhami bawahan agar dapat bekerja guna mencapai tujuan organisasi. Secara umum kepemimpinan adalah suatu kewenangan yang disertai kemampuan seseorang dalam memberikan pelayanan untuk menggerakkan orang-orang yang berada di

bawah koordinasinya dalam usaha mencapai tujuan yang ditetapkan suatu organisasi.

2. Metode

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, penulis tertarik melakukan penelitian di Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis sebagai Desa baru, yang merupakan wilayah pemekaran dari Desa Kadur. Dimekarkan pada tahun 2012 dengan jumlah Rukun tetangga (RT) sebanyak 11 orang dan penduduk yang berjumlah yaitu : 1.568 Jiwa atau sama dengan 418 Kepala Keluarga (KK).

Teknik pengumpulan data yaitu Kuisisioner, wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode analisa statistik deskriptif dengan Skala pengukuran *Rating Scale*, dimana setelah data yang diperlukan diperoleh, dan memberikan alasan yang terperinci mengenai keadaan yang ditemui dilapangan.

Selanjutnya untuk mengukur Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis berdasarkan data angket yang diperoleh dari 68 responden penelitian yang terdiri dari 48 responden Perangkat Desa dan 20 responden Masyarakat (KK). Untuk penilaian setiap kategori, Penulis menggunakan teknik pencarian kategori nilai dengan menggunakan *Rating Scale*. Sugiyono (2013:97), yaitu data mentah yang didapat berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif Untuk mengetahui kriteria tanggapan responden dapat diketahui berdasarkan perhitungan berikut :

a. Kategori penilaian untuk 68 Responden setiap indikator:

$$\text{Kategori Baik} : 3 \times 3 \times 68 = 612$$

$$\text{Kategori Cukup Baik} : 2 \times 3 \times 68 = 408$$

$$\text{Kategori Tidak Baik} : 1 \times 3 \times 68 = 204$$

b. Kategori penilaian untuk variabel fungsi kepemimpinan

$$\text{Kategori Baik} : 3 \times 12 \times 68 = 2448$$

$$\text{Kategori Cukup Baik} : 2 \times 12 \times 68 = 1632$$

$$\text{Kategori Tidak Baik} : 1 \times 12 \times 68 = 816$$

3. Hasil dan Pembahasan

1. Fungsi Perintah

Tabel 3.1

Tanggapan Responden Aparatur Desa dan Masyarakat Tentang Fungsi Perintah Di Puteri Sembilan Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis

No	Sub Indikator	Skor
----	---------------	------

1	Terdapatnya Kepala Desa yang memiliki kemampuan untuk menentukan aparatur yang bekerja sesuai dengan tanggung jawab bidang kerjanya	170
2	Terdapatnya kepala Desa yang memiliki kemampuan untuk mendistribusikan beban kerja sesuai bidang kerjanya	168
3	Terdapatnya Kepala Desa yang memiliki kemampuan untuk menentukan jenis kegiatan yang jadi prioritas	152
Total Skor		490

Sumber Data : hasil olahan penelitian di lapangan tahun 2019

Dari tabel 3.1 diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden penelitian tentang fungsi Perintah Kepala Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis berada pada kategori baik, hal ini dapat dibuktikan dengan skor jawaban dari 68 Responden yaitu: 490 skor.

2. Fungsi Konsultatif

Tabel 3.2

Tanggapan Responden Aparatur Desa dan Masyarakat Tentang Fungsi Konsultatif Kepala Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis

No	Sub Indikator	Skor
1	Terdapatnya Kepala Desa yang memberikan kesempatan kepada aparatur dan masyarakat untuk memberi ide-ide atau saran	133
2	Terdapatnya kepala Desa yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan lembaga-lembaga Desa	134
3	Terdapatnya Kepala Desa yang memiliki kemampuan untuk mengkoordinasi setiap pelaksanaan kegiatan Desa	134
Total Skor		401

Sumber Data : hasil olahan penelitian di lapangan tahun 2019

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden penelitian tentang fungsi konsultasi Kepala Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis berada pada kategori cukup baik, hal ini dapat dibuktikan dengan skor jawaban dari 68 responden yaitu 401.

3. Fungsi Partisipatif

Tabel 3.3

Tanggapan Responden Aparatur Desa dan Masyarakat Tentang Fungsi Partisipatif Pada Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis

No	Sub Indikator	Skor
1	Terdapatnya Kepala Desa yang memiliki kemampuan untuk melibatkan	149

	masyarakat dalam pengambilan keputusan	
2	Terdapatnya kepala Desa yang memiliki kemampuan untuk mengikutsertakan aparatur dan masyarakat dalam kegiatan Desa yang akan dilakukan	156
3	Terdapatnya Kepala Desa yang terlibat langsung dalam kegiatan Desa	144
Total Skor		449

Sumber Data : hasil olahan penelitian di lapangan tahun 2019

Dari tabel 3.3 diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden penelitian tentang fungsi Kepemimpinan Kepala Desa pada Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis berada pada kategori baik, hal ini dapat dibuktikan dengan skor jawaban dari 68 responden yaitu 449.

4. Fungsi Delegasi

Tabel 3.4

Tanggapan Responden Perangkat Desa dan Masyarakat Tentang Fungsi Delegasi Pada Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis

No	Sub Indikator	Skor
1	Terdapatnya Kepala Desa yang memberi beban kerja yang sesuai dengan kemampuan aparatur	133
2	Terdapatnya Kepala Desa yang memberikan tugas dan tanggung jawab kepada aparatur sesuai bidang kerja	129
3	Terdapatnya Kepala Desa yang memiliki kemampuan untuk menentukan aparatur yang dapat bekerja sama secara tim	143
Total Skor		406

Sumber Data : hasil olahan penelitian di lapangan tahun 2019

Dari tabel 3.4 diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden penelitian tentang fungsi delegasi Kepala Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis berada pada antara kategori cukup baik, hal ini dapat dibuktikan dengan skor jawaban yang didapat dari penyebaran angket kepada aparatur Desa dan masyarakat Desa yang berjumlah dari 68 responden yaitu mendapatkan skor 406.

Selanjutnya untuk melihat lebih jelas Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupat Utara secara keseluruhan dari pihak Aparatur Desa dan Masyarakat Desa dari segi aspek yang diteliti dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5

Rekapitulasi Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis

No	Indikator	Skor
1	Fungsi Perintah	490
2	Fungsi Konsultatif	401
3	Fungsi Partisipatif	449
4	Fungsi Delegasi	406
Total Skor	1746	

Sumber Data : hasil olahan penelitian di lapangan tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas mengenai rekapitulasi fungsi kepemimpinan dapat dikatakan bahwa fungsi kepemimpinann Kepala Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupat Utara berada pada kategori Baik, kenyataan ini terbukti pada penelitian dirumuskan dari 68 Responden terdapat total skor 1746.

Faktor Pendukung

a. Adanya Fungsi Perintah dari Kepala Desa Puteri Sembilan.

Kepemimpinan yang bersifat satu arah dari Kepala Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupat Utara kepada perangkat desa dan masyarakat. Disini Kepala Desa sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan dimana perintah itu dikerjakan agar pemerintah Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupat Utara berjalan secara efektif. Tanggung jawab pemimpin atas beban kerja yang tidak mungkin dilaksanakan sendiri, diperlukan adanya upaya mengoptimalkan segenap sumber daya manusia/Aparatur didalam bekerja, salah satunya di dalam melaksanakan fungsi intruksi pemimpin dituntut untuk memahami kerja yang akan diserahkan kepada bawahan melalui menciptakan komunikasi dengan bawahan dan memberikan stimulus dengan memberikan gambaran atas kepentingan beban kerja yang dituntut dari bawahan Kepala Desa yang memiliki kemampuan untuk menentukan aparatur yang bekerja sesuai dengan tanggung jawab bidang kerjanya.

b. Adanya Fungsi Partisipatif dari Kepala Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupat Utara.

Pemimpin memiliki fungsi dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan Desa. Mengingat pentingnya partisipasi aparatur dan masyarakat ini maka perlunya peran pemimpin Desa, terutama Kepala Desa sebagai pemimpin yang formal dalam suatu pemerintahan Desa untuk mempengaruhi aparatur dan masyarakat agar berpartisipasi dalam seluruh kegiatan Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupat Utara. Kepala Desa mempunyai gaya tersendiri dalam menggunakan pengaruhnya agar aparatur dan masyarakat lebih aktif lagi berpartisipasi baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan

pengendalian pembangunan Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupat Utara.

Faktor Penghambat

Dalam Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis tentunya terdapat beberapa kendala. dilihat dari fungsi kepemimpinan terdapat beberapa titik kelemahan yaitu :

a. Masih lemahnya Fungsi Konsultatif dari Kepala Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupat Utara.

Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan sebagai Kepala Desa. Kepala Desa dituntut memiliki kemampuan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan Pemerintahan Desa. Dalam membuat keputusan Kepala Desa kerap kali memerlukan bahan pertimbangan yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Konsultasi dapat dilakukan kepada aparatur, lembaga-lembaga Desa dan masyarakat yang dinilainya mempunyai bahan informasi yang diperlukannya dalam menetapkan keputusan.

Kepala Desa dalam melakukan konsultasi untuk memperoleh masukan berupa umpan balik yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Masih lemahnya kemampuan Kepala Desa untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang ada di Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupat Utara.

b. Masih lemahnya Fungsi Delegasi Kepala Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupat Utara.

Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan kepala Desa, Kepala Desa ditunjuk sebagai perwakilan atau utusan untuk mewakili suatu kelompok atau lembaga tertentu. Dalam organisasi, pendelegasian dapat diberikan kepada bawahan langsung, atau pihak lain yang lebih rendah tingkatnya. Untuk itu Kepala Desa perlu memberi pembekalan dan pengenalan serta pemahaman tugas pokok dan fungsi, sehingga seluruh aparatur nantinya dapat melaksanakan fungsinya secara profesional demi mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan Desa.

4. Kesimpulan

- Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis dapat dikategorikan baik, di lihat melalui lima indikator yaitu: Fungsi Perintah, Fungsi Konsultasi, Fungsi Partisipasi, dan Fungsi Delegasi. Dengan responden 68 orang dengan total skor 1746 (71.32%).
- Faktor pendukung dalam Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis, yaitu ; (a). Adanya Fungsi Perintah dari Kepala Desa Puteri

Sembilan (b). Adanya Fungsi Partisipatif dari Kepala Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupert Utara. Kepala Desa yang memiliki fungsi dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan Desa yang berpartisipasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Adapun yang menjadi faktor penghambat yang dapat mempengaruhi fungsi kepemimpinan Kepala Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis, yaitu : (a). Masih lemahnya Fungsi Konsultatif dari Kepala Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupert Utara, sebagai Kepala Desa dituntut memiliki kemampuan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan Pemerintahan Desa, (b). Masih lemahnya Fungsi Delegasi Kepala Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupert Utara, sebagai Kepala Desa dalam menjalankan fungsi Delegasi melibatkan jabatan yang diemban oleh masyarakat awam sebagai Aparatur Pemerintahan Desa merupakan jabatan yang bersifat tidak terduga dan sementara.

5. Daftar Pustaka

- Pasolong. 2010. Kepemimpinan Birokrasi. Bandung: Alfabeta
- Pasolong. 2013. Kepemimpinan Birokrasi. Bandung: Alfabeta
- Siagian, P. Sondang. 2010. Teori Dan Praktek Kepemimpinan. Jakarta: Reneka Cipta.
- Sinambela. 2006. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta
- PeraturanPerundang-Undangan**
- Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Bengkalis.
- Peraturan Perundang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.